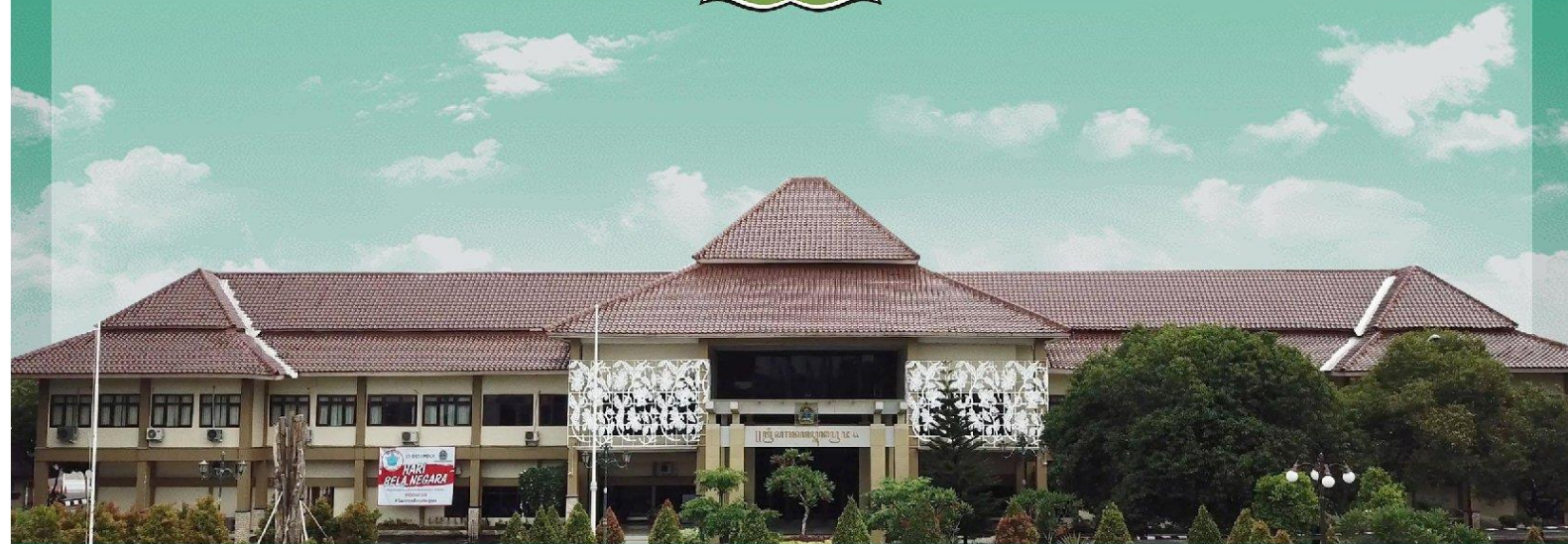




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul 55812





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2024



JOHAN EKO SUDARTO, S. Sos., MH.
NIP. 197109121991011001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan indikator meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat”:
 - Diukur dengan indikator konflik sosial yang tertangani (Jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi Jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial; serta Program Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 90%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 111,11%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 112,36% terjadi penurunan sebesar 1,25%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:
 - Diukur dengan indikator Rerata Capaian dibagi Indikator kinerja kegiatan dikali 1 dikali 100%.



- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Target capaian indikator sasaran Dari data Tahun 2022 karena data Tahun 2023 belum di evaluasi, dari target yang ditetapkan sebesar 80,10 terealisasi 82,55 sehingga capaian kinerja sebesar 103,06%. Dengan demikian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,06%. Dalam LHE AKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2022 tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 78,87% terjadi peningkatan sebesar 3,68%.
- Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yaitu 82,55 (BB). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh negative modernisasi dan dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui smartphone dan kecanggihan teknologi Informasi;



2. Belum kuatnya peran dan Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul sehingga menyebabkan belum optimalnya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten gunungkidul, sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang harus mendapatkan perhatian dari Badan Narkotika Kabupaten;
3. Semakin meningkatnya kebebasan Publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima berita hoax dan membuka peluang terjadinya provokasi dan intimidasi yang berpeluang menjadi konflik sosial di masyarakat;
4. Kemudahan memperoleh informasi belum diimbangi dengan pengetahuan literasi/informasi dunia digital (media Sosial) sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar (HOAX), sehingga Muncul Aplikasi Pinjaman online dan Judi online di Handphone yang merupakan ancaman bagi masyarakat dapat terjerat hutang dan menjadi pemicu konflik sosial;
5. Sering terjadi perubahan pada ketentuan peraturan perundang undangan seperti misalnya Undang –undang no 17 Tahun 2013, tentang ORMAS, telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2017 mengakibatkan adanya perubahan terhadap peraturan di bawahnya, sering berubahnya ketentuan tersebut menyebabkan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan ormas kurang optimal.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I _ PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	3
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	8
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022	11
BAB II _ PERENCANAAN KINERJA	12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB III _ AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.....	25
B. Capaian Kinerja Lainnya	55
C. Efisiensi Anggaran	56
D. Inovasi.....	60
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Langkah Perbaikan Kinerja	64
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	9
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023.....	10
Tabel I.4 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022	11
Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	13
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	15
Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.....	20
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.....	21
Tabel II.6 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	26
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	26
Tabel III.4 Capaian Sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat	27
Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	28
Tabel III.6 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis.....	29
Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	31
Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	32
Tabel III.9 Kegiatan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2023.....	35
Tabel III.10 Kegiatan Penyuluhan Penyuluhan P4GN Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2023	37
Tabel III.11 Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Tahun 2023.....	38
Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	51



Tabel III.13 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	51
Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	51
Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	52
Tabel III.16 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	52
Tabel III.17 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	56
Tabel III.18 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunugkidul	5
Gambar II.1. E-SAKIP	23
Gambar II.2. Sipanda.....	23
Gambar II.3. Siapgaspol	24
Gambar III.2 Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul.....	30
Gambar. III.3 Anggota Korsik Kabupaten Gunungkidul mengiringi upacara	41
Gambar. III.4 Forum Gabungan Perangkat Daerah dengan urusan pemerintahan umum.....	41
Gambar. III.5 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.....	42
Gambar. III.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda	43
Gambar. III.7 Apel P4GN oleh Ketua BNK Gunungkidul	43
Gambar. III.8 Sosialisasi P4GN	44
Gambar. III.9 Latihan Pendidikan Dasar (Ladiksar) bagi Satuan Tugas Anti Narkoba (SAN) di SMP N 1 Wonosari.....	44
Gambar. III.10 Silaturahmi dan Koordinasi Forkopimda dengan Majelis Ulama Indonesia.	45
Gambar. III.11 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.....	45
Gambar. III.12 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.....	46
Gambar. III.13 Anggota Korsik Kesbangpol mengiringi upacara.....	46
Gambar. III.14 Bimbingan Teknis Pengadministrasian Bantuan Keuangan Partai Politik.	47
Gambar. III.15 Pendidikan Politik Masyarakat.....	47
Gambar. III.16 Pembinaan Politik Masyarakat	48
Gambar. III.17 Pendidikan Politik Pemilih Pemula	48
Gambar. III.18 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.....	49
Gambar. III.19 Penghargaan KPP Pratama Wonosari.....	53
Gambar. III.20 Penghargaan Informasi publik oleh Komisi Informasi daerah DIY	53
Gambar III.21 Pembinaan Kepegawaian oleh Bupati Gunungkidul	54
Gambar III.22 Pembinaan Kepegawaian oleh Bupati Gunungkidul	54



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



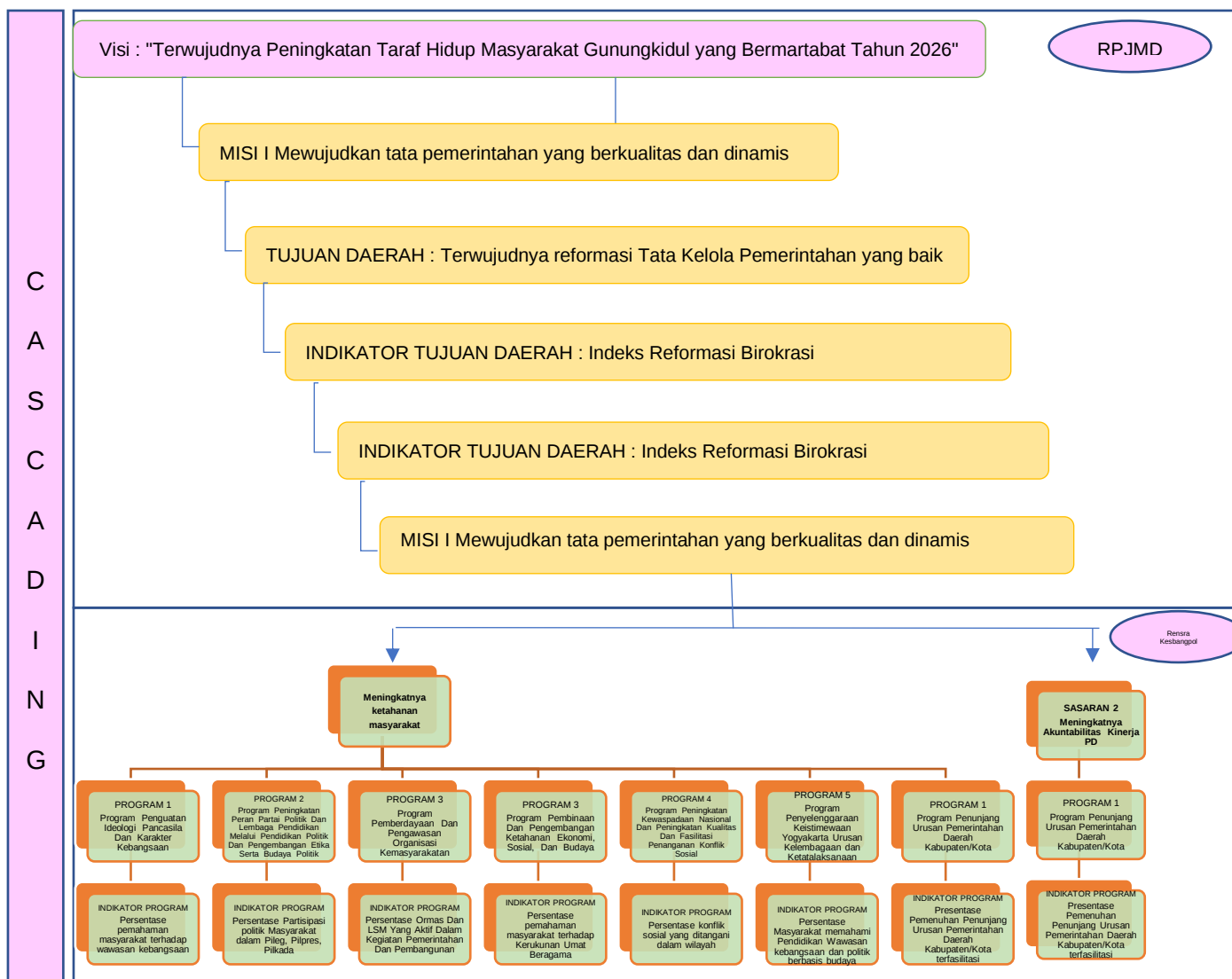
dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023, maka LKjIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2023 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

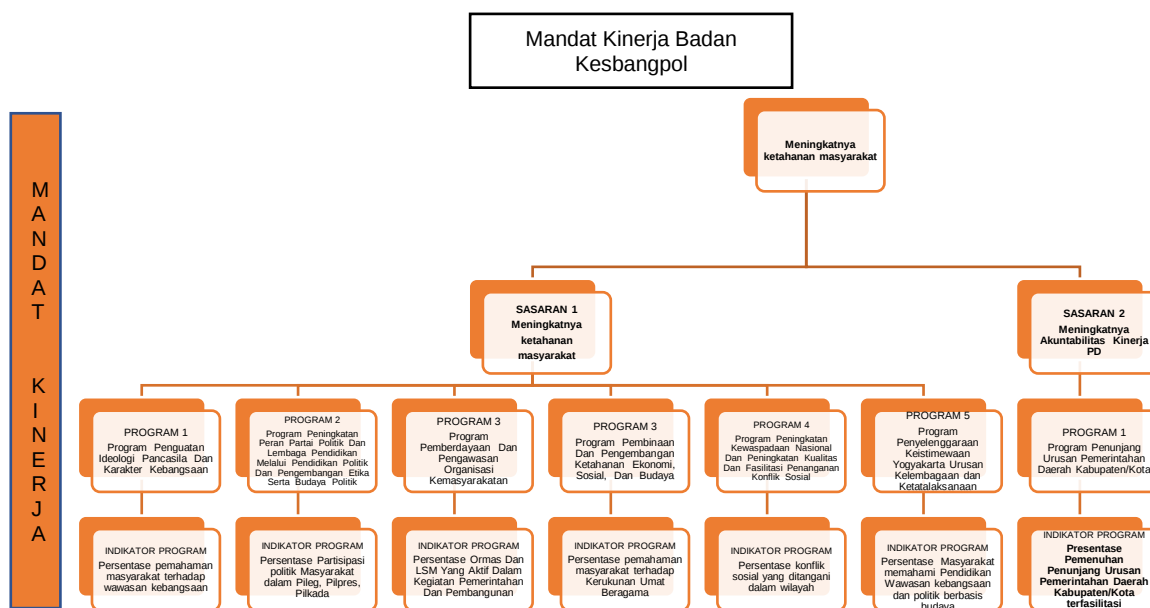


Gambar I.1. Cascading Kinerja

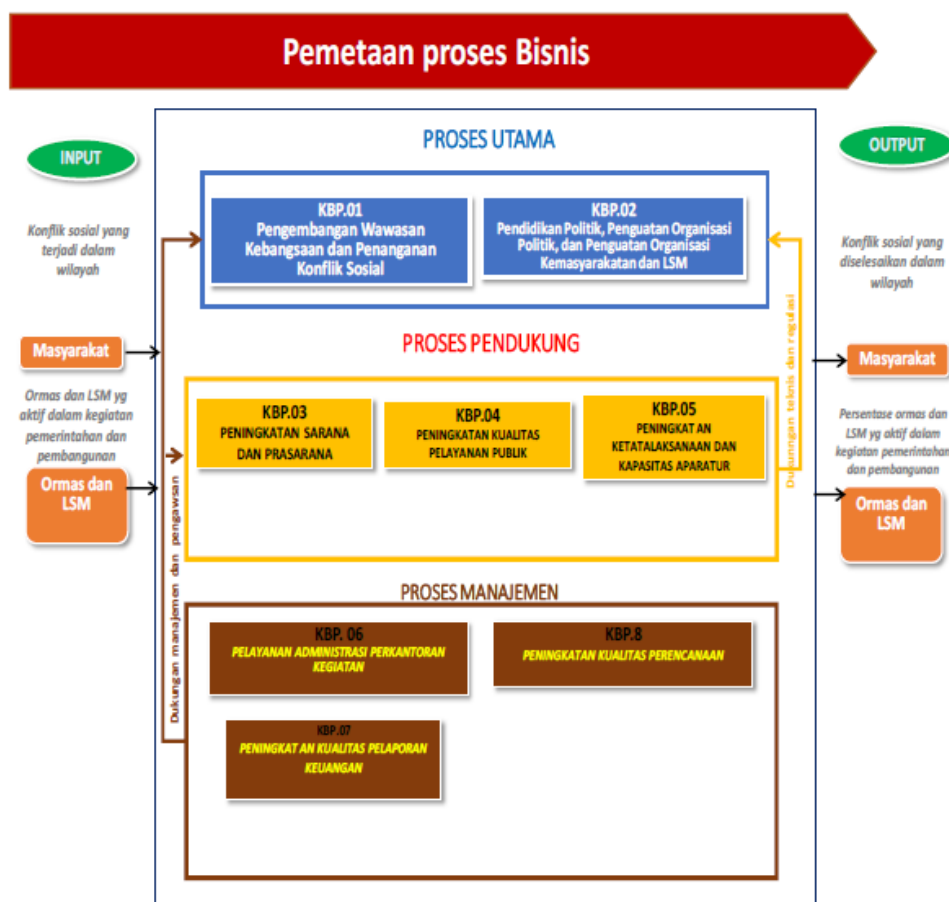
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

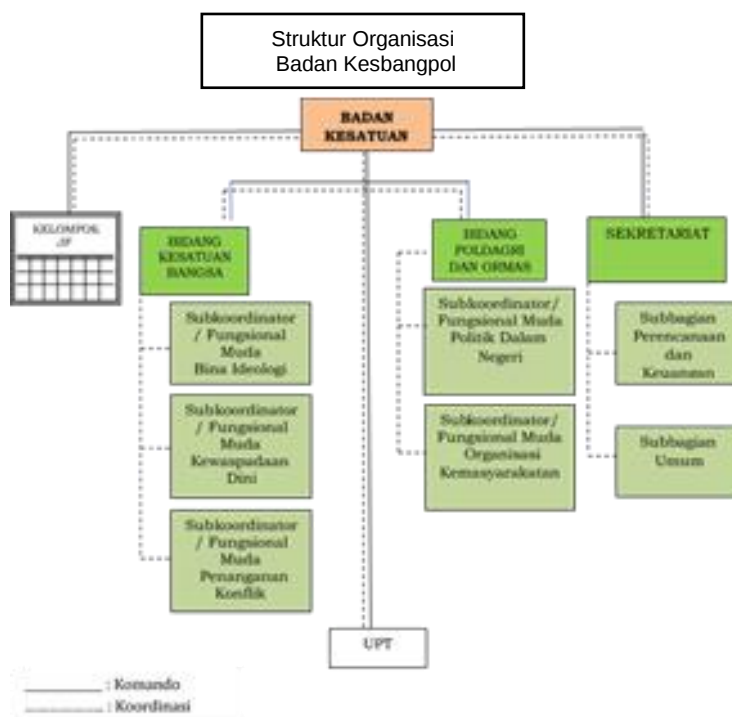
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



**Pengelompokkan Proses Bisnis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**





Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunugkidul

D. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2022. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:



1. Perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;



8. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
9. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa dan politik;
10. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan Bangsa dan Politik; dan
12. Pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh negatif modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui smartphone dan kecanggihan teknologi Informasi
2. Belum kuatnya peran dan Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul sehingga menyebabkan belum optimalnya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Gunungkidul, sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang harus mendapatkan perhatian dari Badan Narkotika Kabupaten.
3. Semakin meningkatnya kebebasan Publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima berita hoax dan membuka peluang terjadinya provokasi dan intimidasi yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat



4. Kemudahan memperoleh informasi belum diimbangi dengan pengetahuan literasi/informasi dunia digital (media Sosial) sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar (HOAX), sehingga Muncul Aplikasi Pinjaman online dan Judi online di Handphone yang merupakan ancaman bagi masyarakat dapat terjatuh hutang dan menjadi pemicu konflik sosial
5. Sering terjadi perubahan pada ketentuan peraturan perundang undangan seperti misalnya Undang – undang no 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2017 mengakibatkan adanya perubahan terhadap peraturan di bawahnya, sering berubahnya ketentuan tersebut menyebabkan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan ormas kurang optimal.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S2				1	S2				1	1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3	3				3	3				2	1
	2. Pengawas	2		2			2	1	1				2
	3. Pelaksana	26		7	18	1	10		4	3	3	4	6
C.	Jabatan Fungsional	6		5	1		4	2	2			2	2
	Jumlah	38	4	14	19	1		7	7	3	3	9	11

Sumber: Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan



merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (35%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (35%), D3 3 orang (15%), SLTA 3 orang (15%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif dan 16 pejabat pelaksana administratif. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni Subbagian 2 yang menangani 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan untuk optimalisasi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
2	Alat-alat Angkutan	11 unit	548.125.351,56
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	226 unit	334.979.023,00
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	20 unit	54.889.054,00
1	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	7 buku	435.000
	Jumlah		938.428.429

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2023 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan operasional, dan 9 (Sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 0	Rp 0	Rp 0
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
			Jumlah Pendapatan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp 15.756.698.287	Rp 25.081.757.287	Rp 9.325.059.000
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp 1.578.303.879	Rp 1.578.303.879	Rp 0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.069.381.650	Rp 3.024.521.650	(Rp 44.860.000)
5	1	05	Belanja Hibah	Rp 11.109.012.758	Rp 20.478.931.758	Rp 9.369.919.000
5	2		BELANJA MODAL	Rp 16.945.000	Rp 13.926.000	(Rp 2.569.000)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 16.945.000	Rp 13.926.000	(Rp 2.569.000)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0
			Jumlah Belanja	Rp 15.773.193.000	Rp 25.095.683.287	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp 15.773.193.000)	(Rp 25.095.683.287)	
6			PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 0	Rp 0	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 0	Rp 0	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0	Rp 0	
			Pembiayaan Neto	Rp 0	Rp 0	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul semula Rp 15.756.698.287,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 25.081.757.287,00 atau berkurang Rp 9.325.059.000,00 Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk



Refocusing dan realokasi anggaran. Secara garis besar anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan, kenaikan pada hibah. Namun secara operasional mengalami penurunan karena *refocusing* anggaran dikarenakan menyesuaikan kebutuhan anggaran di tahun berjalan. Seperti dilihat pada tabel I.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami perubahan perubahan dari Rp 16.945.000,00 menjadi Rp 13.926.000,00 atau berkurang Rp 2.569.000,00.

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Dalam Rangka Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan sebagai berikut :

Tabel I.4 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	NIHIL	Melakukan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, melakukan perbaikan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang sehingga merumuskan permasalahan dan solusi sehingga menjadi rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat”

Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



**Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	88	89	90	91	92	93	93
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	75,39	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	80,25

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa	Pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat (ASN, perangkat desa, swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh difable, anak, dll)



NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (ASN, perangkat desa, swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh difable) serta Pemetaan Politik, Potensi Daerah, dan Potensi Kerawanan konflik Penguatan kapasitas ormas dan LSM Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Penguatan koordinasi, kerjasama dan networking/jejaring dengan TNI, Polri, Kejaksaan, PD terkait, Tim Pengumpul data dan informasi strategis, FKDM, BNK dan mitra kerja dlm penanganan konflik
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:



Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya ketahanan masyarakat	1.1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	383.485.000	383.485.000	0
	1.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	383.485.000	383.485.000	0
	1.1.1.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	383.485.000	383.485.000	-
	1.2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	11.716.771.658	21.086.690.658	9.369.919.000
	1.2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	11.716.771.658	21.086.690.658	9.369.919.000
	1.2.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	376.180.900	376.180.900	-
	1.2.1.2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.340.590.758	20.710.509.758	9.369.919.000

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	118.897.500	118.897.500	0
	1.3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	118.897.500	118.897.500	0
	1.3.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	118.897.500	118.897.500	-
	1.4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	605.643.800	605.643.800	-
	1.4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	605.643.800	605.643.800	-
	1.4.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	605.643.800	605.643.800	-
	1.5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	458.537.600	458.537.600	-
	1.5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	458.537.600	458.537.600	-
	1.5.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.711.600	2.711.600	-

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.5.1.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24.600.000	24.600.000	-
	1.5.1.3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	280.571.000	280.571.000	-
	1.5.1.4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19.455.000	19.455.000	-
	1.5.1.5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	131.200.000	131.200.000	-
	1.6 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	307.120.000	303.220.000	(3.900.000)
	1.6.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	307.120.000	303.220.000	(3.900.000)
	16.1.1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	307.120.000	303.220.000	(3.900.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		13.590.455.558	22.956.474.558	(9.366.019.000)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023



**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2023**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.182.737.729	2.139.208.729	(43.529.000)
	1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.351.000	47.562.500	(9.788.500)
	1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.643.000	27.118.000	(525.000)
	1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.630.000	17.070.000	(8.560.000)
	1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000	300.000	0
	1.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	790.000	475.000	(315.000)
	1.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	430.000	430.000	0
	1.1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.558.000	1.169.500	(388.500)
	1.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	0
	1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.585.583.879	1.585.459.379	(124.500)
	1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.578.303.879	1.578.303.879	0
	1.1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000	1.125.500	(124.500)
	1.1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.030.000	6.030.000	0

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.050.000	11.050.000	0
	1.1.3.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.050.000	11.050.000	0
	1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.785.300	244.594.800	(18.190.500)
	1.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.399.600	5.399.600	0
	1.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.004.000	42.150.500	(2.853.500)
	1.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.488.200	5.488.200	0
	1.1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.149.500	9.799.500	(1.350.000)
	1.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0
	1.1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.544.000	180.557.000	(13.987.000)
	1.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.495.000	13.926.000	(2.569.000)
	1.1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.495.000	13.926.000	(2.569.000)
	1.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.850.050	94.600.050	(1.250.000)
	1.1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.320.000	31.070.000	(1.250.000)
	1.1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.999.050	41.999.050	0
	1.1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.531.000	21.531.000	0
	1.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.622.500	142.016.000	(11.606.500)



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.300.000	76.693.500	(11.606.500)
	1.1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.640.000	10.640.000	0
	1.1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.682.500	51.682.500	0
	1.1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	0
Total Anggaran Pendukung		2.182.737.729	2.139.208.729	(43.529.000)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	90	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	90



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Persen	82,55	Triwulan I	-
					Triwulan II	80,10
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	82,55

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	90	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Persen	82,55	Triwulan I	-
					Triwulan II	80,10
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	82,55

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.6 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	383.485.000,00	APBD



Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	21.086.690.658,00	APBD
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	118.897.500,00	APBD
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	605.643.800,00	APBD
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	458.537.600,00	APBD
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	303.220.000,00	Dais
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.139.208.729,00	APBD

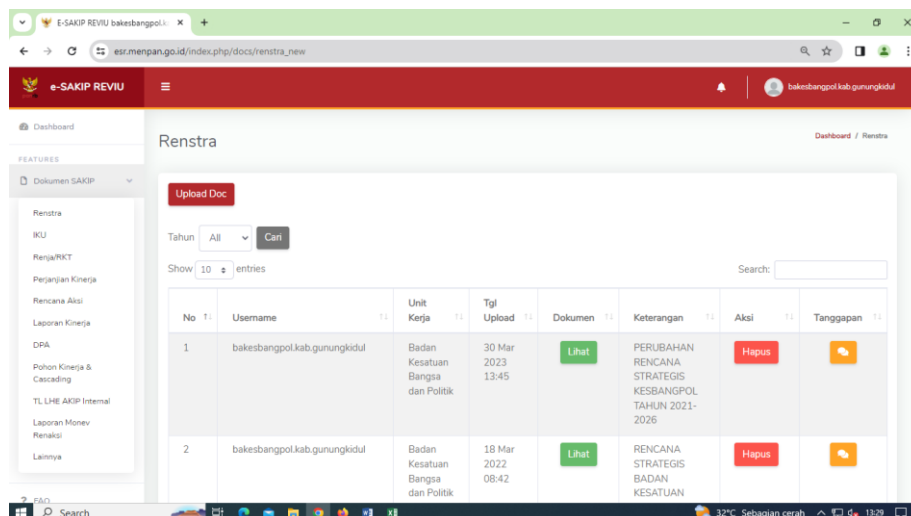
Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran Bertambah 37,14% sehubungan adanya penambahan hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk kegiatan pemilu tahun 2024.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga .
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi .

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

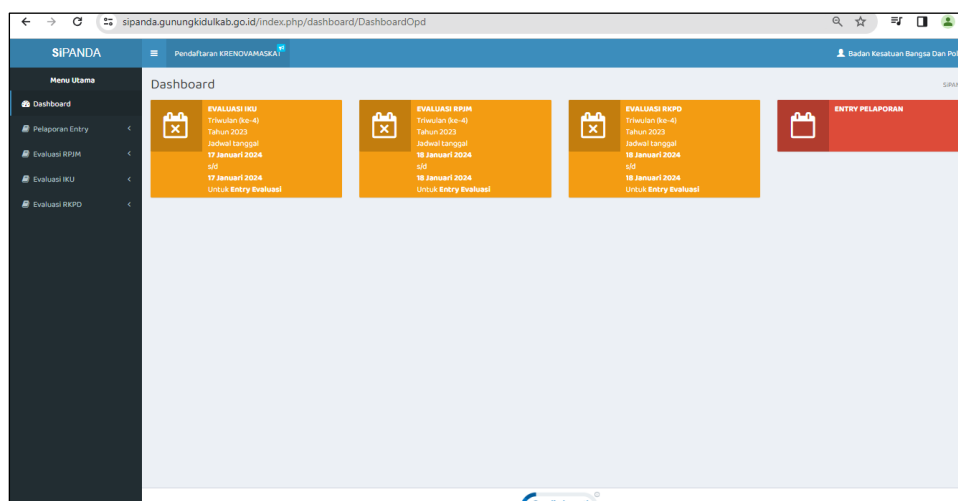
Instumen Pendukung Capaian Kinerja pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.1. E-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.2. Sipanda

3. Instrumen pendukung dalam data ormas, pendaftaran ormas , dan dokumentasi dari organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kabupaten Gunungkidul, yakni Aplikasi Online Sistem Informasi Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan dan Organsisasi Politik (siapgaspol). Selain berfungsi untuk pendataan dan pendaftaran Ormas, aplikasi ini juga berperan dalam Pemberdayaan Ormas yang meliputi



Sosialisasi Regulasi, Bimbingan Teknis dan Koordinasi, serta Pengawasan Ormas berupa pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas.



Gambar II.3. Siapgaspol



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAI AN 2022	TAHUN 2023				TARGE T AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITE RIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	<u>Indikator:</u> Persentase konflik sosial yang tertangani <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100 persen	Persentase	114,94	112,36	90	100	111,11	Sangat Tinggi	93
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	<u>Indikator:</u> Nilai AKIP PD <u>Meta Indikator:</u> Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	skor	75,17	78,87	83,10	82,55*	103,06	Sangat Tinggi	80,25

Ket *: realisasi AKIP Tahun 2022

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan ketahanan masyarakat

Kinerja sasaran Meningkatkan ketahanan masyarakat diukur dengan jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100 persen meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	Konflik sosial adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan



No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. $\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$ Tipologi data: Non Kumulatif m

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			
		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	90	100	111,11	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 111,11%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 100 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90.

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa Indikator Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah telah mencapai target, dari target 90% realisasinya 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,11%. Berdasarkan data yang ada di tahun 2023, ada 4 (empat) konflik sosial yang terjadi dan dari 4 (empat) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya sebesar 100%.

Berdasarkan data historis dalam kurun 2021 - 2023, realisasi angka persentase konflik masyarakat yang tertangani menunjukkan penurunan dan stabil. Dari data dan juga dari gambar III.3 Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah, persentase konflik masyarakat yang terselesaikan justru cenderung stabil.



Pada pada tahun 2021, realisasi persentase konflik masyarakat yang tertangani sebesar 100% dari 4 (empat) konflik yang terjadi sejumlah 4 (empat). Sedangkan pada tahun 2022, ada 3 (tiga) konflik sosial yang terjadi dan dari 3 (tiga) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya konflik sosial yang terjadi disimpulkan penanganan konflik sosial 100%. Pada tahun 2023, ada 4 (empat) konflik sosial yang terjadi dan dari 4 (empat) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya konflik sosial yang terjadi disimpulkan penanganan konflik sosial 100%. Persentase konflik masyarakat yang tertangani dari data historis dari tahun 2021-2023 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar III.1 Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Realisasi kinerja sebesar 100 pada tahun 2023 stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023		
Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100	100	93	123,46



Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 100 menjadi 100 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 100.

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja relative stabil dikarenakan potensi konflik dapat tertangani. Konsistensi dalam kesetabilan kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 111,11 dicapai melalui kegiatan pembinaan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi selalu berupaya dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada dapat meningkat, peran serta ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan meningkat, pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama meningkat, konflik sosial yang ditangani dalam wilayah meningkat, sekaligus dapat meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: *forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK),* serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Selain perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun, perbandingan capaian kinerja dengan OPD lain yang sejenis juga dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi yang lebih akurat. Berikut ini disajikan perbandingan indikator, target dan realisasi sasaran strategis dari OPD lain.

Tabel III.6 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis

No.	Nama OPD	Sasaran Strategis	Indikator	Target %	Realisasi %	% Realisasi Target
1	Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul	Meningkatnya Ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	89	100	112,36
2	Kesbangpol Kota Yogyakarta	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik	82%	82,73	101



No.	Nama OPD	Sasaran Strategis	Indikator	Target %	Realisasi %	% Realisasi Target
3	Kesbangpol Kota Malang	Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	72,05	70,58	72%
4	Kesbangpol Kabupaten Banjar	Mewujudkan Masyarakat berwawasan kebangsaan dan kondusifitas	Prosentase Konflik yang berhasil ditangani	100	100	100

Sumber: data tahun 2022

Gambar III.2 Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Gunungkidul



Sumber : Subbidang Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target Sasaran masalah/kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun dengan indikator kinerja persentase konflik masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.



Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	$\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$ Tipologi data: Non Kumulatif
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kerukunan Umat Beragama	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non komulatif
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non komulatif
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	$\frac{\sum \text{Jumlah Ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan}}{\sum \text{Jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar}} \times 100\%$ Tipologi data: Non komulatif
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang mengikuti pemilu}}{\sum \text{Jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih}} \times 100\%$ Tipologi data: Non komulatif
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik	Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100% Tipologi data: Non komulatif



Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat berikut:

Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Sasaran	Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	Konflik sosial yang tertangani	126,25	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	85	96,71	113,77 Sangat Tinggi
			2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	80	100	125 Sangat Tinggi
			3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan	70	110,43	157,75 Sangat Tinggi
			4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kerukunan Umat Beragama	85	94,35	111 Sangat Tinggi
			5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	90	100	111,11 Sangat Tinggi



Sasaran	Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
			6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	72	100	138,88 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					80,33	100,25	126,25 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Konflik sosial yang tertangani rata-rata 100,25%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keenam program utama tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan OPD dan Instansi Vertikal dengan peserta dari unsur/kelompok masyarakat antara lain: Organisasi Kemasyarakatan, Pamong Kalurahan, Badan Permuyawaratan Kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, karangtaruna, kalangan pelajar, kelompok perempuan dan sebagainya, Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran konflik sosial yang tertangani tersebut didukung dari :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari kegiatan:

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang terdiri atas beberapa antara lain:

a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anak/Usia Dini, yaitu :

- 1) Lokasi di TK N Nglipar (Wawasan Kebangsaan Forkopimda)
- 2) Lokasi di TK N Nglipar (Wawasan Kebangsaan Forkopimda)

b) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Forkopimda, yaitu :

- 1) Lokasi di Tancep, Ngawen (Sosialisasi Wawasan Kebangsaan PIS).



c) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pokir, yaitu:

- 1) Pada bulan Januari 2023 di Wiladeg-Karangmojo dan Songbanyu-Girisubo.
- 2) Pada bulan Februari 2023 di Banyusoco-Playen, Bleberan-Playen, Kenteng Ngalang-Gedangsari, Plosodoyong Ngalang-Gedangsari, Wareng Ngalang-Gedangsari.
- 3) Pada bulan Maret 2023 di Ngleri-Playen, Banaran-Playen, Pulutan-Wonosari, Selang-Wonosari, Karangsari Pengkol-Nglipar, dan Pengkol-Nglipar.
- 4) Pada bulan April 2023 di Semanu Tengah-Semanu, Sidoharjo-Tepus, Pacarejo-Semanu, Sumberwungu-Tepus, Tepus-Tepus, Dan Nglegi-Patuk.
- 5) Pada bulan Mei 2023 di Dengok-Playen, Getas-Playen, Ngleri-Playen, Gading-Playen, dan Playen-Playen.
- 6) Pada bulan Juni 2023 di Kembang Nglegi-Patuk, Trukan Nglegi-Patuk, Kedungkeris-Nglipar, Pringsurat Kedungkeris-Nglipar dan Sendowo Kidul Kedungkeris- Nglipar
- 7) Pada bulan Juli 2023 di Kepek-Wonosari, Siraman-Wonosari, Wonosari-Wonosari, Dengok-Playen dan Ngleri-Playen.
- 8) Pada bulan Agustus 2023 di Karangawen-Girisubo, Nglindur-Girisubo, Purwodadi-Tepus, Sidoharjo-Tepus, Dan Jerukwudel-Girisubo.
- 9) Pada bulan Agustus 2023 di Ngawu-Playen, Ngunut-Playen, Ngaliyan Nglipar-Nglipar, Nglipar Kidul-Nglipar, dan Semugih-Rongkop.

2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terdiri atas beberapa sub kegiatan antara lain:

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, Berikut kegiatan yang dilaksanakan Bidang Kesatuan bangsa pada tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel III.9 Kegiatan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Bidang
Kesatuan Bangsa Tahun 2023

No	Hari/Tanggal	Acara
1	06 Februari 2023	KUB Pokir Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo
2	07 Februari 2023	KUB Pokir Kal. Gedangrejo Kap. Karangmojo
3	08 Februari 2023	KUB Pokir Kal. Karangduwet Kap. Paliyan
4	09 Februari 2023	KUB Pokir Kal. Pampang Kap. Paliyan
5	13 Februari 2023	KUB Pokir Kal. Girisekar Kap. Panggang
6	14 Februari 2023	KUB Pokir Kal. Giriwungu Kap. Panggang
7	06 Maret 2023	KUB Pokir Kal. Logandeng Kap. Playen
8	07 Maret 2023	KUB Pokir Kal. Bandung Kap. Playen
9	13 Maret 2023	KUB Pokir Kal. Plembutan Kap. Playen
10	14 Maret 2023	KUB Pokir Kal. Gari Kap. Wonosari
11	20 Maret 2023	KUB FORKOPIMDA di MTA Bandung Kapanewon Playen
12	20 Maret 2023	KUB Pokir Kal. Banaran Kap. Playen
13	03 April 2023	KUB Pokir Kal. Selang Kap. Wonosari
14	10 April 2023	KUB Pokir Kal. Karangtengah Kap. Wonosari
15	10 April 2023	KUB Pokir Kal. Piyaman Kap. Wonosari
16	11 April 2023	KUB Pokir Kal. Wareng Kap. Wonosari
17	17 April 2023	KUB Pokir Kal. Wunung Kap. Wonosari
18	08 Mei 2023	KUB Pokir Kal. Ngestirejo Kap. Tanjungsari
19	09 Mei 2023	KUB Pokir Padukuhan Sanglor II Kal. Girisuko Kap. Panggang
20	16 Mei 2023	KUB Pokir Kal. Giriwungu Kap. Panggang
21	22 Mei 2023	KUB Pokir Kal. Giriharjo Kap. Panggang
22	23 Mei 2023	KUB Pokir Kal. Kemadang Kap. Tanjungsari
23	29 Mei 2023	KUB Pokir Kal. Ngestirejo Kap. Tanjungsari
24	08 Juni 2023	KUB Pokir Kal. Banjarejo Kap. Tanjungsari
25	12 Juni 2023	KUB Pokir Kal. Kemadang Kap. Tanjungsari
26	13 Juni 2023	KUB Pokir Kal. Hargosari Kap. Tanjungsari
27	14 Juni 2023	KUB Pokir Kal. Jetis Kap. Saptosari
28	20 Juni 2023	KUB Pokir Kal. Kemiri Kap. Tanjungsari
29	22 Juni 2023	KUB Pokir Kal. Planjan Kap. Saptosari



No	Hari/Tanggal	Acara
30	06 Juli 2023	KUB Pokir Kal. Balong Kap. Girisubo
31	10 Juli 2023	KUB Pokir Kal. Jepitu Kap. Girisubo
32	11 Juli 2023	KUB Pokir Kal. Karangawen Kap. Girisubo
33	17 Juli 2023	KUB Pokir Kal. Nglindur Kap. Girisubo
34	20 Juli 2023	KUB Pokir Kal. Songbanyu Kap. Girisubo
35	24 Juli 2023	KUB Pokir Kal. Tileng Kap. Girisubo
36	04 Agustus 2023	KUB Pokir Kal. Petir Kap. Rongkop
37	08 Agustus 2023	KUB Pokir Kal. Botodayaan Kap. Rongkop
38	11 Agustus 2023	KUB Pokir Padukuhan Kuwon Lor Kal. Pacarejo Kap. Semanu
39	14 Agustus 2023	KUB Pokir Padukuhan Pringapus Kal. Pucanganom Kap. Rongkop
40	21 Agustus 2023	KUB Pokir Padukuhan Nglindur Wetan Kal. Nglindur Kap. Girisubo
41	22 Agustus 2023	KUB Pokir Padukuhan Pacungan Kal. Tepus Kap. Tepus
42	07 September 2023	KUB Pokir Kal. Purwodadi Kap. Tepus
43	08 September 2023	KUB Pokir Kal. Semanu Kap. Semanu
44	13 September 2023	KUB Pokir Kal. Sumberwungu Kap. Tepus
45	14 September 2023	KUB Pokir Kal. Sidoharjo Kap. Tepus
46	15 September 2023	KUB Pokir Kal. Pacarejo Kap. Semanu
47	18 September 2023	KUB Pokir Kal. Tepus Kap. Tepus
48	11 Oktober 2023	KUB PIS Kal. Giripanggung Kap. Tepus
49	12 Oktober 2023	KUB PIS Kal. Girisuko Kap. Panggang
50	13 Oktober 2023	KUB PIS Kal. Bedoyo Kap. Ponjong
51	06 November 2023	KUB PIS Kal. Sidoharjo Kap. Tepus
52	07 November 2023	KUB PIS Kal. Sidorejo Kap. Ponjong
53	08 November 2023	KUB PIS Kal. Tancep Kap. Ngawen

3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas



Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat kegiatan seperti ditampilkan pada table di bawah ini:

Tabel III.10 Kegiatan Penyuluhan Penyuluhan P4GN Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	KET
1	Penyuluhan P4GN POKIR	10 Februari 2023	Karangduwet Paliyan	POKIR
2	Penyuluhan P4GN POKIR	15 Maret 2023	Banyusoco Playen	POKIR
3	Penyuluhan P4GN POKIR	13 April 2023	Dengok Playen	POKIR
4	Penyuluhan P4GN POKIR	24 Mei 2023	Gading Playen	POKIR
5	Penyuluhan P4GN POKIR	12 Juni 2023	Getas Playen	POKIR
6	Penyuluhan P4GN POKIR	12 Juli 2023	Logandeng Playen	POKIR
7	Penyuluhan P4GN POKIR	23 Agustus 2023	Ngleri Playen	POKIR
8	Penyuluhan P4GN	16 Februari 2023	Beji, Ngawen	PIS
9	Penyuluhan P4GN	9 Maret 2023	Giripurwo, Purwosari	PIS
10	Penyuluhan P4GN	12 April 2023	Girisuko Panggang	PIS
11	Penyuluhan P4GN	13 November 2023	Jurangjero Ngawen	PIS
12	Penyuluhan P4GN	14 November 2023	Kampung Ngawen	PIS
13	Penyuluhan P4GN	15 November 2023	Sambirejo Ngawen	PIS
14	Penyuluhan P4GN	16 November 2023	Pucanganom Rongkop	PIS
15	Penyuluhan P4GN	13 Desember 2023	Watusigar Ngawen	PIS
16	Penyuluhan P4GN	19 Desember 2023	Rejosari Semin	PIS
17	Penyuluhan P4GN oleh FORKOPIMDA	15 Juni 2023	Karangmojo, Karangmojo	
18	APEL BERSAMA WABUP SEBAGAI KETUA BNK SOSIALISASI P4GN	15 Februari 2023	Smk N 1 Karangmojo	
19	SOSIALISASI P4GN	14 April 2023	Smk Muhammadiyah 1 Playen	
20	APEL BERSAMA WABUP SEBAGAI KETUA BNK SOSIALISASI P4GN	22 Mei 2023	Sma N 1 Patuk	
21	SOSIALISASI P4GN	19 Juni 2023	Smp N 2 Playen	



NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	KET
22	APEL BERSAMA WABUP SEBAGAI KETUA BNK SOSIALISASI P4GN	24 Juli 2023	Smk N 1 Wonosari	
23	APEL BERSAMA WABUP SEBAGAI KETUA BNK SOSIALISASI P4GN	14 Agustus 2023	Sma N 2 Playen	
24	APEL BERSAMA WABUP SEBAGAI KETUA BNK SOSIALISASI P4GN	18 September 2023	Smk N 3 Wonosari	
25	RENJA ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan)	19 Januari 2023	Ruang rapat Handayani Setda Kab. Gunungkidul	

4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan pembinaan bimtek pengadministrasian bantuan keuangan partai politik dan bimtek laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. yang terdiri atas kegiatan:

Tabel III.11 Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri
Organisasi Kemasyarakatan & LSM Tahun 2023

NO	BULAN	HARI	TANGGAL	WAKTU	JENIS KEGIATAN	TEMPAT/ RUANG KEGIATAN
1	JULI	Senin	10 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Pembinaan ORMAS	Kalurahan Hargosari
2		Rabu	12 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Dikpol	Kalurahan Jurangjero
3		Kamis	13 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Dikpol	Kalurahan Sambirejo

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



NO	BULAN	HARI	TANGGAL	WAKTU	JENIS KEGIATAN	TEMPAT/ RUANG KEGIATAN
4		Jumat	14 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Dikpol	Kalurahan Kepek, Wonosari
5		Senin	17 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Polmas	Kalurahan Selang, Wonosari
6		Selasa	18 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Kalurahan Songbanyu, Girisubo
7		Senin	24 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Padukuhan Paliyan Kidul, Karangduwet, Paliyan
8		Selasa	25 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Padukuhan Wareng, Kepek, Saptosari
9		Rabu	26 Juli 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Kalurahan Karangduwet Paliyan
10	AGUSTUS	Rabu	09 Agustus 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Polmas	Kalurahan Selang, Wonosari
11		Jumat	11 Agustus 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Kalurahan Nglindur Girisubo
12		Senin	14 Agustus 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Polmas	Kalurahan Selang, Wonosari
13		Jumat	18 Agustus 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Polmas	Kalurahan Wonosari
14		Senin	21 Agustus 2023	09.00 WIB - Selesai	Pokir Polmas	Kalurahan Ngestirejo Tanjungsari
15		Senin	21 Agustus 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Kalurahan Petir Rongkop
16		Selasa	22 Agustus 2023	13.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Kalurahan Pacarejo Semanu
17		Selasa	22 Agustus 2023	09.00 WIB - Selesai	Forkom Ormas	RR Bhumikarta SETDA
18	SEPTEMBER	Kamis	07 September 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Ormas	Kalurahan Mulusan
19		Kamis	07 September 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Kalurahan Planjan Saptosari
20		Jumat	08 September 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Padukuhan Jetis, Pampang, Paliyan
21		Senin	11 September 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Polmas	Kalurahan Tancep Ngawen
22		Rabu	13 September 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Kalurahan Pampang Paliyan
23		Kamis	14 September 2023	13.00 WIB - Selesai	POKIR Polmas	Kalurahan Semanu, Semanu

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



NO	BULAN	HARI	TANGGAL	WAKTU	JENIS KEGIATAN	TEMPAT/ RUANG KEGIATAN
24		Jumat	15 September 2023	13.00 WIB - Selesai	Pokir Polmas	Kalurahan Tileng Girisubo
25		Rabu	20 September 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Polmas	Kalurahan Wunung Wonosari
26		Rabu	20 September 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Ormas	Kalurahan Getas Paliyan
27		Kamis	21 September 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Polmas	Kalurahan Tancep Ngawen
28	OKTOBER	Selasa	10 Oktober 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Pembinaan Politik Masyarakat	Balai Kalurahan Watusigar, Ngawen
29		Rabu	11 Oktober 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Pembinaan Politik Masyarakat	Balai Kalurahan Beji, Ngawen
30		Selasa	17 Oktober 2023	09.00 WIB - Selesai	PIS Pembinaan Ormas	Balai Kalurahan Getas, Playen
31		Rabu	18 Oktober 2023	09.00 WIB - Selesai	POKIR Pembinaan Politik Masyarakat	Balai Kalurahan Watusigar, Ngawen
32		Rabu	25 Oktober 2023	09.00 WIB - Selesai	Bimtek Pengadministrasi an Bantuan Keuangan Partai Politik	Ruang Rapat Badan Kesbangpol Kab. Gunungkidul
33		Selasa	31 Oktober 2023	09.00 WIB - Selesai	FORKOM Pembinaan Politik Masyarakat (GOW)	OMAH KAYU RESTO

5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas kegiatan:

- Kamis, 16 Maret 2023 (PIS) Ormas Kalurahan Tancep Ngawen
- Selasa, 21 Maret 2023 (PIS) Ormas Kalurahan Tancep
- Selasa , 16 Mei 2023 (PIS) Ormas Kalurahan Pucanganom Rongkop
- Kamis, 22 Juli 2023 (Pokir) Ormas Kalurahan Hargosari Tanjungsari
- Kamis, 21 September 2023 (Pokir) Ormas Kalurahan Sodo Paliyan



- Rabu, 27 September 2023 (PIS) Ormas Kalurahan Getas Playen
- Selasa, 17 Oktober 2023 (PIS) Ormas Kalurahan Getas Playen
- Selasa, 22 Agustus 2023 Pembinaan Ormas Bersama Forkopimda

Beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 tersebut diantaranya:

- a) Anggota korsik pada tanggal 12 Juli 2023 di Tanjungsari turut serta sebagai petugas dalam acara pembukaan TMMD yang bertempat di Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari.

Gambar. III.3 Anggota Korsik Kabupaten Gunungkidul mengiringi upacara



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Forum Gabungan Perangkat Daerah dengan urusan pemerintahan umum. Bertempat di Ruang Rapat Sat Pol PP Kab. Gunungkidul.

Gambar. III.4 Forum Gabungan Perangkat Daerah dengan urusan pemerintahan umum



Sumber : Subbag. Umum Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. bertempat di Balai Kalurahan Getas Kapanewon Playen Hadir dalam kesempatan tersebut Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Purwo Handoko, S.Sos., MM, Danramil 02 Playen Kapten Setyono, Plt. Kasat Binmas Kepolisian Resort Gunungkidul IPTU Agus Muwahidin, Lurah Getas Saekat, dan anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Getas.

Gambar. III.5 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan



Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan pada hari Kamis, 16 November 2023 di Balai Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen. Peserta dalam sosialisasi ini terdiri dari tokoh pemuda, Karang Taruna, Tokoh Wanita, lembaga kalurahan dan Pamong Kalurahan Tancep. Hadir dalam sosialisasi ini, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, Ahmad Ahsan Jihadan, S.Psi., MA, Danramil Ngawen, Kapten CBA Tri Aji Laga dan Anggota Forum Bela Negara Kabupaten Gunungkidul, Wiwik Widarjanti.



Gambar. III.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- e) Ketua Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul Heri Susanto S. Kom.,M.Si, bertindak sebagai pembina apel di SMKN 3 Wonosari. Sebanyak 1185 siswa dengan jumlah laki-laki 577 dan perempuan sejumlah 608 mengikuti Apel di SMKN 3 Wonosari. Apel juga diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Karyawati dan Siswa SMKN 3 Wonosari. Kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi siswa SMKN 3 Wonosari merupakan upaya pembinaan dan sosialisasi bagi pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan upaya tidak terjadinya kejahatan jalanan bagi remaja..

Gambar. III.7 Apel P4GN oleh Ketua BNK Gunungkidul



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang berasal dari anggaran Pagu Indikatif Sektoral. Hadir Ahmad Ahsan Jihadan, S.Psi., M.A selaku Sekretaris Badan Kesbangpol beserta narasumber Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto,S.Kom, M.Si selaku ketua Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul, Heri Kusyanto, S.H selaku Panitera



Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonosari, Boni Yogi Rusdi Nainggolan pimpinan Pondok Pemulihan Elkana.

Gambar. III.8 Sosialisasi P4GN



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- g) Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Latihan Pendidikan Dasar (Ladiksar) bagi Satuan Tugas Anti Narkoba (SAN). Ladiksar dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2023 bertempat di SMP N 1 Wonosari. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan pembekalan dan sosialisasi bagi SAN agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal di lingkungan sekolah. Ladiksar diikuti oleh 20 peserta SAN P4GN SMP N 1 Wonosari. Hadir sebagai narasumber Wakil Bupati Gunungkidul selaku Ketua BNK Gunungkidul Bapak Heri Susanto S.Kom M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul Bapak Johan Eko Sudarto S.Sos, MH, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa H Kusni Sumaryanti, SH, Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini Bidang Kesatuan Bangsa Yulia Tri Wibawati S.IP MPA..

Gambar. III.9 Latihan Pendidikan Dasar (Ladiksar) bagi Satuan Tugas Anti Narkoba (SAN) di SMP N 1 Wonosari



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- h) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Forkopimda dengan Ormas Keagamaan di Aula Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Cabang Playen pada hari Senin, 20 Maret 2023. Hadir 40 peserta yang berasal dari pengurus dan anggota MUI Gunungkidul, Pengurus dan anggota MTA Gunungkidul, serta Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul. Turut hadir sebagai narasumber



yaitu, Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri, SIK, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sukarni Winarti, S.H..

Gambar. III.10 Silaturahmi dan Koordinasi Forkopimda dengan Majelis Ulama Indonesia.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- i) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD pada hari Kamis, 14 September 2023 di Balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus. Peserta pembinaan merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan Pamong Kalurahan Sidoharjo. Turut hadir sebagai narasumber yaitu, Wakil Sekretaris I FKUB Gunungkidul, Kardi, S.Pd.H. dan anggota FKUB, H. Nurasid, S.H..

Gambar. III.11 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- j) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Balai Kalurahan Sodo Kapanewon Paliyan, Hadir dalam kesempatan tersebut Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Widodo, SH, Kapten Inf Redani selaku Danramil 1 2 Paliyan, Kasat Binmas



Polres Gunungkidul AKP Mujiman, Lurah Sodo Sunaryo, dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Sodo.

Gambar. III.12 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan



Sumber : Subbidang Ormas & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- k) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan bertempat di Balai Kalurahan Getas Kapanewon Playen Hadir dalam kesempatan tersebut Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Purwo Handoko, S.Sos., MM, Danramil 02 Playen Kapten Setyono, Plt. Kasat Binmas Kepolisian Resort Gunungkidul IPTU Agus Muwahidin, Lurah Getas Saekat, dan anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Getas.

Gambar. III.13 Anggota Korsik Kesbangpol mengiringi upacara



Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- l) Bimbingan Teknis Pengadministrasian Bantuan Keuangan Partai Politik. Dengan narasumber Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sujatmiko Nurhasan, SE, dan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum Inspektorat Daerah, Rr. Noor Indra Tri Wulandari, SE . Peserta tenaga administrasi partai politik yang memiliki kursi di dewan.



Gambar. III.14 Bimbingan Teknis Pengadministrasian Bantuan Keuangan Partai Politik.



Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- m) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Pembinaan Politik Masyarakat. Hadir dalam kesempatan ini Anggota DPRD Gunungkidul Bambang Supriyanto, A.Md., Kep, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Sumarto, S.Pd., MM, Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Rohmad Qomarudin, S.Pd.I, Komisioner Bawaslu Gunungkidul Mugi Hartana SH, Lurah Tileng Suwardi, S.Pd dan Peserta dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Karang Taruna.

Gambar. III.15 Pendidikan Politik Masyarakat.



Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- n) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pembinaan Politik Masyarakat di Kalurahan Watusigar Ngawen. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Sumarto, S.Pd, MM, Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Rohmad Qomaruddin, S.Pd.I, Komisioner Bawaslu Gunungkidul Retnoningsih, M.MPd Lurah Watusigar Giman.



Gambar. III.16 Pembinaan Politik Masyarakat



Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- o) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Pembinaan Politik Masyarakat di Balai Kalurahan Planjan Saptosari Hadir dalam kesempatan ini Anggota DPRD Gunungkidul Anwarudin, S.IP Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Sumarto, S.Pd., MM, Komisioner Bawaslu Gunungkidul Retnoningsih, M.MPd, Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Supami, S.Sos Carik Planjan Budi Setiyanto, S.IP dan Peserta dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Karang Taruna.

Gambar. III.17 Pendidikan Politik Pemilih Pemula



Sumber : Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- p) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Ruang Rapat Bhumiarta Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Gunungkidul H. Sunaryanta, Kepala Badan Kesbangpol Gunungkidul Johan Eko Sudarto, S.Sos., MH, Kasat Intelkam Polres Gunungkidul AKP, Ismanto, SH, beserta anggota Organisasi



Kemasyarakatan PPAD, Pepabri, PP Polri, dan PWRI Kabupaten Gunungkidul

Gambar. III.18 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan



Sumber : Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
- b. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul.
- c. Meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik.
- d. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat, LSM dan partai politik belum berjalan dengan optimal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan strategi yang tepat dengan mengoptimalkan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.



- b. Melakukan berbagai kegiatan baik di masyarakat ataupun dikalangan pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan instansi dan lembaga terkait.
- c. Memfokuskan pada memberdayakan FKUB, FKDM, PPWK, FPK, BNK dan lembaga-lembaga yang diwadahi oleh pemerintah/ masyarakat dari tingkat kabupaten sampai desa untuk lebih berperan dalam pencegahan konflik.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme dengan mengubah format pembinaan dengan format baru yang lebih menarik bagi masyarakat.
- e. Menyasar pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dari berbagai macam kalangan masyarakat baik itu perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, anak-anak.
- f. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik dan memperluas jangkauannya untuk meningkatkan atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
- b. Koordinasi yang baik antara Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul dengan forum-forum kemitraan, seperti FKUB, FPK, dan FKDM.
- c. Adanya Perda maupun Pergub yang menguatkan kegiatan yang akan dilaksanakan.



Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Tabel III.13 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,10	82,55*	103,06	Sangat Tinggi

Dari data diatas menggunakan data Tahun 2022 karena data Tahun 2023 belum di evaluasi, terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,10 terealisasi 82,55 sehingga capaian kinerja sebesar 103,06%. Dalam LHE AKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2022 tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	78,87	82,55	-	83	80,05

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2023

*) Nilai LKjIP tahun 2022



Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yaitu 82,55 (BB). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel III.16 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	103,06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul mempunyai komitmen selalu mengedepankan keterbukaan informasi dalam melakukan pelayanan badan publik. Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Kabupaten Gunungkidul memperoleh 1 penghargaan yaitu oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari sebagai wajib pajak bendahara atas kontribusinya dalam menghimpun penerimaan negara sebagai pemotong/pemungut pajak serta melaksanakan kewajiban perpajakan.

Gambar. III.19 Penghargaan KPP Pratama Wonosari



Sumber : Subbag. Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul mempunyai komitmen selalu mengedepankan keterbukaan informasi dalam melakukan pelayanan badan publik. Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul memperoleh 2 penghargaan yaitu oleh Komisi Informasi Daerah DIY keterbukaan informasi badan publik kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-DIY sebagai Badan Publik Informatif, dan penghargaan oleh Bupati Gunungkidul keterbukaan informasi badan publik kategori Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai Badan Publik Informatif.

Gambar. III.20 Penghargaan Informasi publik oleh Komisi Informasi daerah DIY



Sumber : Subbag. Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul melaksanakan kegiatan pembinaan ASN oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul.

Gambar III.21 Pembinaan Kepegawaian oleh Bupati Gunungkidul



Sumber : Subbag. Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambar III.22 Pembinaan Kepegawaian oleh Bupati Gunungkidul



Sumber : Subbag. Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Kualitas sumberdaya yang perlu ditingkatkan



- b. Kompetensi aparatur belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan
- c. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan
- d. Jaringan sinergitas Tupoksi antar bidang yang perlu diperkuat
- e. Akses terhadap data dan informasi perlu ditingkatkan

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP
- b. Maksimalkan pemanfaatan fasilitas pendukung kerja (sarana prasarana) serta anggaran yang ada dalam upaya menghadapi semakin kompleksnya permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara normatif sesuai peraturan perundangundangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Lembaga

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Jumlah sumber daya yang memadai
- b. Komitmen pimpinan yang kuat dalam memajukan visi dan misi kesatuan bangsa
- c. Dukungan pengembangan Informasi dan Teknologi dan jaringan yang memadai

B. Capaian Kinerja Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 tidak mengampu kegiatan lain seperti SPM dan SDG's, karena berdasarkan tupoksinya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.



C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tertanggal 2 November 2023 mendapat alokasi dana sejumlah Rp25.095.683.287,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp24.697.818.815,00 atau 98,41%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp397.864.472,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.13 berikut:

Tabel III.17 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	303.220.000	278.721.055	91,92	24.498.945	8,08
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	303.220.000	278.721.055	91,92	24.498.945	8,08
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	383.485.000	374.615.626	97,69	8.869.374	2,31
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	383.485.000	374.615.626	97,69	8.869.374	2,31
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.086.690.658	21.060.979.807	99,88	25.710.851	0,12

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21.086.690.658	21.060.979.807	99,88	25.710.851	0,12
1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	376.180.900	353.736.049	94,03	22.444.851	5,97
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.710.509.758	20.707.243.758	99,98	3.266.000	0,02
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	118.897.500	113.210.634	95,22	5.686.866	4,78
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	118.897.500	113.210.634	95,22	5.686.866	4,78
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	605.643.800	596.840.950	98,55	8.802.850	1,45

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
6	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	605.643.800	596.840.950	98,55	8.802.850	1,45
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	458.537.600	428.130.525	93,37	30.407.075	6,63
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	458.537.600	428.130.525	93,37	30.407.075	6,63
	1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.711.600	2.466.450	90,96	245.150	9,04
	2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24.600.000	15.800.000	64,23	8.800.000	35,77
	3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	280.571.000	275.956.575	98,36	4.614.425	1,64

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
	4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19.455.000	18.507.500	95,13	947.500	4,87
	5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	131.200.000	115.400.000	87,96	15.800.000	12,04
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.139.208.729	1.845.320.218	86,26	293.888.511	13,74
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.562.500	44.796.000	94,18	2.766.500	5,82
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.585.459.379	1.449.838.670	91,45	135.620.709	8,55
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.050.000	11.045.000	99,95	5.000	0,05
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.594.800	102.057.189	41,73	142.537.611	58,27
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.926.000	13.830.000	99,31	96.000	0,69
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.600.050	82.525.315	87,24	12.074.735	12,76
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.016.000	141.228.044	99,45	787.956	0,55
Jumlah		25.095.683.287	24.697.818.815	98,41	103.975.961	1,59

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2023 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.18 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi
1.	Persentase konflik sosial yang tertangani	90	100	111,11	22.956.474.558	22.852.498.597	99,55	103.975.961
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	80,10	82,55*	103,06	2.068.997.887	2.037.768.650	98,49	31.229.237
Jumlah Belanja Total					25.095.683.287	24.697.818.815	98,41	135.205.198
Jumlah Belanja Program Utama					22.956.474.558	22.852.498.597	99,55	103.975.961
Jumlah Belanja Program Penunjang					2.068.997.887	2.037.768.650	98,49	31.229.237

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2023

*) Nilai LKjIP tahun 2022

Berdasarkan tabel III.15 di atas capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 25.095.683.287,00 terealisasi Rp24.697.818.815,00 atau 98,41% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp397.864.472,00 atau 1,59% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Belanja tidak direalisasikan karena FORKOMPIMDA tidak mengagendakan kegiatan.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:



1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul misalnya aplikasi Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul (<https://siapgaspol-kesbangpol.gunungkidulkab.go.id/>)
3. Proyek Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gunungkidul dengan “Strategi Optimalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Membangun Kerukunan di Kabupaten Gunungkidul tujuan akhirnya adalah untuk menjaga dan merawat kohesi sosial di Kabupaten Gunungkidul yaitu membangun, menjaga, dan merawat kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul atau lebih dikenal dengan sekolah penggerak kerukunan dengan dasar hukum Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Penggerak Kerukunan sebagai berikut :

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 350 / KPTS/TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH PENGGERAK KERUKUNAN
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman tentang kerukunan masyarakat perlu adanya kegiatan melalui Sekolah Penggerak Kerukunan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu adanya pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Penggerak Kerukunan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Penggerak Kerukunan, dengan Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah Penggerak Kerukunan sebagaimana dimaksud dalam Dikrum KESATU Keputusan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonorejo
pada tanggal 7 November 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL
[Signature]
KUSUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.

**LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 350 / KPTS / 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH PENGGERAK KERUKUNAN

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH PENGGERAK KERUKUNAN**

I. DASAR

Kerukunan merupakan sikap yang harus dijaga untuk tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain, tolong-menolong dan toleransi antar sesama.

Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- Undang, organisasi kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam membangun kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa.

Bahwa tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan tersebut diatas adalah sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, sarana partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau, sebagai sarana pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan fungsi dari pendirian organisasi kemasyarakatan adalah sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, sarana partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau, sebagai sarana pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan sekolah penggerak kerukunan ini dalam rangka meningkatkan solidaritas sebagai penggerak nilai toleransi bagi masyarakat/generasi muda. Dengan adanya sekolah penggerak kerukunan ini akan memperkuat wawasan kerukunan di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

II. TUJUAN

Kegiatan Sekolah Penggerak Kerukunan bertujuan meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dalam rangka membangun kerukunan di Kabupaten Gunungkidul.

III. PENYELENGGARA

Sekolah Penggerak Kerukunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

IV. PESERTA

Peserta Sekolah Penggerak Kerukunan berasal dari anggota organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul.

V. MATERI/KURIKULUM

Materi Penyelenggaraan Sekolah Penggerak Kerukunan meliputi :

No.	Materi	Waktu
1	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	2 JPL
2	Moderasi Beragama	2 JPL
3	Wawasan Kebangsaan	2 JPL
4	Kadikalisasi	2 JPL
5	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2 JPL
6	Mediasi Konflik	2 JPL
7	Bela Negara	2 JPL
8	Organisasi Kemasyarakatan	2 JPL
7	Orientasi lapangan	1 hari

Sumber Data: Bidang Kesatuan Bangsa



BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SDM yang masih belum mumpuni baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
2. Masih tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gunungkidul
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
4. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul.
5. Meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik.
6. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.
7. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat, LSM dan partai politik belum berjalan dengan optimal.
8. Keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari kerja sama yang baik antara internal dan stakeholder terkait. Penguatan forum-forum kemitraan juga di lakukan dengan maksimal sesuai dengan ketugasan masing-masing.



B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
2. Peningkatan kualitas dan sinergitas program ketahanan nasional dengan melibatkan para pemangku kepentingan
3. Peningkatan fasilitas pendukung berbasis elektronik (website)
4. Melaksanakan program kegiatan Sinau Pancasila dengan materi 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika
5. Melaksanakan Pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus Partai Politik serta pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Daerah.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan supaya ormas dapat mengetahui dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mempunyai peningkatan kapasitas.
7. Melaksanakan program kegiatan melalui sosialisasi bahaya penggunaan narkoba.
8. Melaksanakan program kegiatan melalui sosialisasi pencegahan terorisme.
9. Melaksanakan fasilitasi forum-forum kemitraan yang mendukung kondusivitas wilayah Gunungkidul (FKDM, FKUB, FPK).
10. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial di masyarakat.
11. Melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekonomi daerah.



LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Th 2023 beserta perubahannya*
- 2. Evaluasi LKjIP Tahun 2022*
- 3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2022*



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**